

# PEMBERITAAN MEDIA

EDISI  
24 - 30 Mei 2021

**LULUK'S UPDATE**

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

# **Pendanaan Perubahan Iklim**

# Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US\$ 247 miliar atau sekitar Rp 3.461 triliun untuk perubahan iklim

Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar **US\$ 247 miliar** atau sekitar **Rp 3.461 triliun** selama periode **2018-2030** untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setiap tahun.

Estimasi ini sesuai dengan dokumen **Second Biennial Update Report 2018**

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengestimasi kebutuhan Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) setiap tahun adalah sebesar **Rp 343,32 triliun**.

Merujuk pada pendanaan APBN yang disediakan untuk perubahan iklim berdasarkan data budget tagging tahun 2019 dan 2020, serta merujuk pada kebutuhan per tahun dan data budget tagging tersebut maka **pendanaan masih terdapat gap yang cukup besar**, yaitu sekitar **60-70%** dari total kebutuhan dananya.

# Komitmen Pemerintah Indonesia

Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU 16 tahun 2016 telah menyampaikan komitmennya melalui NDCs yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan Internasional.

Salah satu upaya konkret pemerintah untuk mendukung pendanaan NDC atau pendanaan lingkungan hidup secara umum adalah **pembentukan Indonesian Environment Fund (IEF)** atau yang disebut **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)** pada tahun 2019.

BPDLH diresmikan pada akhir 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat **Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup** dan **Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup**.

# Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Selain bidang kehutanan, BPDLH juga mengelola dana untuk energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan sebagainya.

Badan ini merupakan **Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan** yang pengelolaannya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, prudent dan profesionalisme. Selain itu, IEF didesain dengan menerapkan standar tata kelola internasional.

Sesuai dengan dasar pembentukannya, IEF dibangun untuk **mendukung program-program pengelolaan lingkungan hidup strategis yang berada di Kementerian/ Lembaga**. IEF berperan sebagai trustee bagi pemilik dana/program. IEF bekerja berdasarkan pada mandat yang diberikan oleh K/L selaku pemilik program dan juga mandat yang diberikan pemilik dana.

# Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

**Kewenangan teknis dan pelaksanaan program tetap berada pada K/L teknis sebagai pemilik program.** Pengelolaan dana lingkungan hidup oleh IEF dilaksanakan berdasarkan kontrak antara IEF dan pemilik dana/program. Pengeluaran dana oleh bank trustee/custodian dilakukan berdasarkan perintah IEF.

**IEF memegang aspek legalitas** dari pemilik dana yang diletakkan pada bank custodian dan atau bank trustee, dan menyalurkan manfaat kepada penerima manfaat/beneficiaries sesuai mandat.

IEF dapat menerapkan blended scheme dengan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program-program Kementerian/Lembaga secara berkelanjutan.

IEF selain mengelola dana reboisasi yang disalurkan dengan skema dana bergulir, juga dimandatkan untuk mengelola dana hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral. Inovatif financing juga perlu dieksplorasi oleh EIF untuk menciptakan income stream bagi IEF, seperti inovatif financing berbasis sumberdaya alam/karbon

# **BPD LH Mendapat Komitmen Mengelola Rp 11,71 triliun**

BPD LH mendapatkan komitmen mengelola dana hingga 836 juta dollar AS atau Rp 11,71 triliun yang digunakan untuk pendanaan lingkungan hidup dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Adapun dana kelolaan tersebut didapat dari beberapa lembaga internasional yang sudah menyampaikan komitmennya. Kendati demikian, dana-dana tersebut masih dalam proses negoisasi perjanjian pembayaran.

## **Enam Lembaga internasional tersebut:**

1. Green Climate Fund (GCF)
2. REDD+ Norway
3. Bank Dunia melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
4. BioCarbon Fund (BCF)
5. Ford Foundation
6. Bank Dunia



## **Pertama, Green Climate Fund (GCF)**

- Nilai komitmen mencapai 103,8 juta dollar AS atau Rp1,47 triliun
- Dana ini akan diberikan bertahap sejak 2021 hingga 2023 dan didasari pada kinerja. Pencairan tahap pertama akan dilakukan pada Juli atau Agustus 2021.
- Pada tahun pertama pembayaran, dana bakal digunakan untuk penguatan enabling condition yang mendukung program sektor kehutanan dalam rangka pengurangan emisi GRK.
- Dana disalurkan berdasarkan hasil kinerja alias jika indikator yang telah disusun dan disepakati bersama KLHK tercapai.
- Sekarang masih dalam proses negosiasi perjanjian pembayaran dengan UNDP dan GCF, diperkirakan masuk Juli atau Agustus.
- Kemudian penyaluran dalam 4 tahun ke depan dengan jumlah per tahun sekitar 20 jutaan (dollar AS)



## Kedua, REDD+ Norway

- Nilai komitmen 560 juta dollar AS atau Rp 7,99 triliun
- Akan dicairkan mulai 2021 hingga 2030
- Rencananya pada tahap pertama akan dicairkan dana sebesar US\$56 juta.
- Saat ini masih negosiasi perjanjian pembayaran, dan tergantung negosiasinya, bisa tahun ini atau tahun depan.
- Penyaluran dana ini berbasis kinerja.

## **Ketiga, dari Bank Dunia melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)**

- Nilai komitmen 110 juta dollar AS atau Rp1,56 triliun.
- Dana akan dicairkan pada 2021, 2023, dan 2025 dengan masing-masing perolehan 25 juta dollar AS, 40 juta dollar AS, dan 45 juta dollar AS.
- Hanya diperuntukkan bagi Kalimantan Timur.
- Pencairan dana juga akan didasari pada kinerja pemerintah provinsi Kaltim dalam menerapkan kebijakan pengurangan emisi gas buang.
- Saat ini, BPD LH dan IBRD sebagai Trustee FCPF telah menandatangani Emission Reduction Payment Agreement (ERPA).
- Sejauh ini pendanaan sedang dalam proses finalisasi benefit sharing plan oleh BPD LH, KLHK dan Pemprov Kaltim.

## Keempat, BioCarbon Fund (BCF)

- Nilai komitmen 60 juta dolar AS atau Rp855 miliar.
- Dana itu dikhususkan bagi wilayah Jambi
- Akan dicairkan selama 2023 hingga 2025.
- Pencairan bergantung pada kinerja Pemerintah Jambi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Saat ini sedang dalam proses penyusunan benefit sharing mechanism antara BPD LH, KLHK, dan Pemprov Jambi.

## **Kelima, Ford Foundation**

- Nilai komitmen sebesar 1 juta dolar AS atau Rp14,25 miliar pada 2021.
- Saat ini sedang dalam tahap penyusunan proposal yang akan ditindaklanjuti dengan negosiasi bentuk dan mekanisme penyaluran kepada penerima manfaat.
- Nantinya dana itu juga akan digunakan di sektor kehutanan.

## Keenam, dana dari Bank Dunia

- Nilainya sebesar 2,1 juta dolar AS atau Rp29,92 miliar
- Jangka waktu tiga tahun, yaitu 2021-2024
- Untuk mengembangkan kapasitas BPD LH melaksanakan tugas dalam mengelola dana lingkungan hidup seperti membangun safeguards indicator, environmental and social monitoring system (ESMS), dan action plan ESMS.

# Referensi

- <https://www.validnews.id/ekonomi/bpdh-berpotensi-kelola-dana-lingkungan-hidup-hingga-us836-juta>
- <https://www.antarane.ws.com/berita/2178434/bpdh-akan-kelola-dana-capai-836-juta-dolar-as>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210527164537-532-647548/ri-dapat-rp11-t-dari-bank-dunia-buat-proyek-lingkungan-hidup>
- <https://voi.id/ekonomi/54554/jaga-alam-indonesia-asing-kucurkan-dana-rp12-5-triliun-lewat-bpdh-kementerian-keuangan>
- <https://voi.id/ekonomi/55163/kabar-baik-untuk-warga-jambi-bank-dunia-rencanakan-pengucuran-dana-segar-rp858-miliar>
- <https://money.kompas.com/read/2021/05/27/172647026/bpldh-bakal-kelola-dana-836-juta-dollar-as?page=all>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybD42QZb-ri-butuh-rp3-461-triliun-untuk-capai-target-pengurangan-emisi-hingga-41>
- <https://investor.id/macroeconomics/pemerintah-butuh-rp-3433-triliun-per-tahun-untuk-turunkan-emisi-karbon>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210527/9/1398601/butuh-dana-rp3461-triliun-kurangi-emisi-bpdh-raih-komitmen-rp1171-triliun>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4567845/jalankannya-paris-agreement-indonesia-butuh-rp-34332-triliun-per-tahun>
- <https://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416345/kurangi-emisi-ri-butuh-rp343-triliun-tiap-tahun>
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1375628-komitmen-pengurangan-emisi-ri-butuh-rp343-triliun-tiap-tahun?medium=home&link=terbaru>
- <https://www.pajak.com/ekonomi/bpdh-akan-kelola-dana-836-juta-dollar-as/>
- <https://www.industry.co.id/read/86357/kurangi-emisi-pemerintah-butuh-dana-capai-rp3461-triliun-hingga-2030>
- <https://medannews.id/2829/indonesia-butuh-rp343-32-triliun-kurangi-emisi-setiap-tahun/>



# Madani

